



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD yang mengacu kepada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi serta berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari Kabupaten/Kota serta masyarakat sebatas tidak melanggar kewenangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Rencana Kerja ini merupakan suatu dokumen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang merupakan uraian lebih mendetail dari rencana-rencana strategis, penetapan kinerja, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagai langkah untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat diperbaiki dan ditingkatkan pencapaian kinerjanya sesuai dengan tuntutan perubahan dari masyarakat maupun *stakeholders* dan mampu menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang semakin cepat dan pesat.

Pada akhir tahun Rencana Kinerja tersebut diukur capaian kinerjanya (*performance result*) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi/OPD. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan mengidentifikasi sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) untuk perbaikan kinerja dimasa datang.



Proses Penyusunan Rencana Kerja Proses penyusunan Renja Dinas Perkimtan Tahun 2026 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada, baik secara formal maupun non formal serta dengan memperhatikan hasil pelaksanaan kinerjanya di tahun 2025 yang menjadi acuan sebagai bahan evaluasi kinerja.

Garis besar proses penyusunan Renja Dinas Perkimtan adalah : 1) Tahap persiapan kegiatan penyusunan rancangan Renja Dinas Perkimtan dimulai sebelum Rancangan Awal RKPD diterima, atau segera setelah RAPBD Tahun 2025 disahkan menjadi APBD. Langkah-langkah pada kegiatan persiapan mencakup identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim penyusun Renja PD, penyiapan kelembagaan forum PD, pengisian formulir, penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan Renja Dinas Perkimtan. 2) Tahap kegiatan analisis dan pengkajian dokumen kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap rancangan awal RKP Nasional dan RKPD Provinsi, review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra PD, kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD, meminta/menerima rancangan awal RKPD secara resmi dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat. 3) Tahap Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja Kegiatan ini dilaksanakan setelah PD menerima secara resmi dokumen Rancangan Awal RKPD dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dijadikan pedoman penyusunan rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD kemudian menjadi acuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi selanjutnya ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkimtan berpedoman kepada RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. RKPD Provinsi Sumatera Barat yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkimtan Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Renstra Dinas Perkimtan yang memuat visi, misi arah kebijakan teknis dan rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi tugas



pemerintah khususnya pada urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh perangkat daerah dan berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkimtan juga memperhatikan dan menindaklanjuti visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program dan kegiatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemeterian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Penyusunan Renja OPD disusun oleh tim penyusun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berpedoman pada dokumen perencanaan terkait menjadi dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
15. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 600 - 469 - 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2026 adalah memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk satu tahun mendatang serta sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja dinas tahun 2026 adalah :

1. Mensikronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Tahun 2026 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD tahun 2026.
2. Menjadi acuan seluruh bidang/unit-unit kerja di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
3. Menjadi acuan dalam menilai pencapaian kinerja bidang/unit-unit kerja di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat yang kemudian akan berakumulasi menjadi pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dengan anggaran.
5. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Awal Renja Dinas Perkimtan terdiri dari :

1.1 Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renja Dinas Perkimtan, proses penyusunan Renja Dinas Perkimtan, Keterkaitan antara Renja Dinas Perkimtan dengan Dokumen RKPD dan Renstra Bappeda dan dengan Renja K/L

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur



tentang SOTK, urusan kewenangan Dinas Perkimtan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perkimtan tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Perkimtan serta susunan dokumen laporan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menguraikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Perkimtan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Tahun 2026

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perkimtan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perkimtan Tahun 2021-2026.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisi uraian berupa penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2026, yang mengacu kepada APBD tahun berjalan serta mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2024 dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, serta untuk memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan perencanaan tahun 2026, hasil evaluasi kinerja pada tahun 2024 menjadi salah satu input penting untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Untuk mendukung dan menjalankan tugas dan fungsinya, pada tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat telah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 120.953.672.630,00. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 8 program (7 program urusan dan 1 program penunjang) meliputi 17 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Dari jumlah tersebut realisasi anggaran yang telah terserap pada tahun 2024 adalah Rp. 118.719.784.960,00 dengan realisasi keuangan sebesar 100% dan realisasi capaian fisik sebesar 98,15%, dengan realisasi belanja langsung yang terdiri dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasarannya dapat diuraikan berikut ini :



- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.042.954.950,00 dan realisasi sampai Desember 2024 sebesar Rp. 9.481.869.569,00 atau sebesar 97,09% dengan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 140.001.900,00 terealisasi sampai Desember 2024 sebesar Rp. 120.486.700 atau 86,06% dengan realisasi fisik 100%. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan yaitu:
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.656.867.503,00 terealisasi sampai Desember 2024 sebesar Rp. 7.252.689.166,00 atau 94,72% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan yaitu :
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 141.459.000,00 terealisasi sampai Desember 2024 sebesar Rp. 133.469.101,00 atau 96,13% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan yaitu :
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
 - pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD.
 - d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 81.871.000,00 terealisasi sampai Desember 2024 sebesar Rp. 69.201.805,00 atau 84,53% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan yaitu :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 955.183.900,00 terealisasi sampai Desember 2024 sebesar Rp.



866.128.053,00 atau 90,68% dengan realisasi fisik 100 %. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 81.365.485,00 terealisasi sampai Desember 2024 sebesar Rp. 69.556.000 atau 85,49% dengan realisasi fisik 100%, berupa sub kegiatan sebagai berikut :
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 479.536.162,00 terealisasi sampai Desember 2024 sebesar Rp. 466.471.944,00 atau 97,28% dengan realisasi fisik 100%, berupa sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 506.670.000,00 terealisasi sampai Desember 2024 sebesar Rp. 503.866.800,00 atau 99,45% dengan realisasi fisik 100%, berupa sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 2) Program Pengembangan Perumahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 386.827.750,00 terealisasi sampai Desember 2024 sebesar Rp. 346.756.375,00 atau 89,64% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 303.947.750,00 terealisasi sampai Desember 2024 sebesar Rp. 277.233.397,00 atau 91,21%

dan realisasi fisik sebesar 100%, dengan realisasi fisik 100%, berupa sub kegiatan sebagai berikut :

- Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi.
- b) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.880.000 terealisasi sampai Desember 2024 sebesar Rp. 69.522.978,00 atau 83,88% dengan realisasi fisik 100%, berupa sub kegiatan sebagai berikut :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan.
- 3) Program Kawasan Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.164.965.500,00 dengan realisasi sampai Desember 2024 sebesar Rp. 1.953.179.169,00 atau 90,22% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan di bawah 15 (lima belas) hektar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 186.188.600,00 terealisasi sampai Desember 2024 sebesar Rp. 153.209.600,00 atau 82,29% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan sub kegiatan yaitu :
- Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
- b) Kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.978.776.900,00 terealisasi sampai Desember 2024 sebesar Rp. 1.799.969.569,00 atau 90,96% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan sub kegiatan yaitu :
- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha.
 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha.
- 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 108.148.836.130,00 dengan realisasi sampai desember 2024 sebesar Rp. 106.747.946.417,00 atau 98,7% dan realisasi fisik sebesar 100,00% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 108.148.836.130,00 dengan realisasi sampai desember 2024 sebesar Rp. 106.747.946.417,00 atau 98,7% dan realisasi fisik sebesar 100,00% dengan kegiatan sebagai berikut :



- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.
 - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman.
 - Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman.
- 5) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan alokasi anggaran Rp. 46.530.850,00 terealisasi sampai Desember 2024 sebesar Rp. 44.871.300,00 atau 96,43% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.530.850,00 terealisasi sampai Desember 2024 sebesar Rp. 44.871.300,00 atau 96,43% dan realisasi fisik sebesar 100%, dengan sub kegiatan
- Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
- 6) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan alokasi anggaran Rp. 80.288.050,00 teralisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 69.973.380,00 atau 87,15% dan realisasi fisik sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.288.050,00 teralisasi sampai Desember 2024 sebesar Rp. 69.973.380,00 atau 87,15% dan realisasi fisik sebesar 100%, dengan sub kegiatan antara lain adalah :
- Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- 7) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dengan alokasi anggaran Rp. 43.269.400 teralisasi sampai Desember 2024 sebesar Rp. 39.661.750,00 atau 91,66% dan realisasi fisik sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 43.269.400 teralisasi sampai Desember 2024 sebesar Rp. 39.661.750,00 atau



91,66% dan realisasi fisik sebesar 100%, serta pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan sub kegiatan yaitu :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

8) Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dengan alokasi anggaran Rp. 40.000.000,00 terealisasi sampai Desember 2024 adalah Rp. 35.527.000,00 atau 88,82% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan anggaran Rp. 40.000.000,00 terealisasi sampai Desember 2024 adalah Rp. 35.527.000,00 atau 88,82% serta realisasi fisik pelaksanaan kegiatan 100% dengan sub kegiatan yaitu :

- Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota.



Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan

Kode Rekening		Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Dan Anggaran Tahn 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
1		2	3		4	5	6	7	8	9
1		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1.04		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				120.743.584.330,00		118.529.751.530,00	100%	98,14%
1.04.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				10.042.954.950,00		9.481.869.569,00	100%	97,09%
1.04.01	1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	17	140.001.900,00	17	120.486.700,00	100%	86,06%
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	dokumen	4	37.020.000,00	4	35.808.900,00	100%	96,73%
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	laporan	3	7.107.000,00	3	6.342.500,00	100%	89,24%
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	dokumen	4	95.874.900	4	78.335.300	100%	81,71%
1.04.01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan Dinas Perkimtan	bulan	12	6.850.137.604,00	12	6.738.658.863,00	100%	98,37%
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	orang	58	7.038.800.003,00	58	6.640.111.666,00	100%	94,34%
	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang Disusun	dokumen	4	618.067.500,00	4	612.577.500,00	100%	99,11%
1.04.01	1.03	Adiminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi barang milik daerah perangkat daerah	bulan	12	110.267.500,00	12	104.118.500,00	100%	94,42%
	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				36.400.000,00		36.327.250,00	100%	99,8%



Kode Rekening		Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	laporan	1	105.059.000,00	1	97.141.851,00	100%	92,46%
1.04.01	1.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	meningkatnya disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur	persentase	60	130.835.000,00	60	70.170.300,00	100%	53,63%
	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	stel	75	41.250.000,00	75	41.195.000,00	100%	99,87%
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat	orang	7	40.621.000,00	7	28.006.805,00	100%	68,95%
1.04.01	1.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum Dinas Perkimtan	bulan	12	782.286.656,00	12	766.771.062,00	100%	98,02%
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	buah	166	9.782.200,00	166	9.758.710,00	100%	99,76%
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	43	115.024.600	43	114.344.070,00	100%	99,41%
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	12	89.326.800,00	12	86.495.660,00	100%	96,83%
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	eksemplar	96	13.585.000,00	96	13.385.900,00	100%	98,53%
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	dokumen	1	722.465.300,00	1	637.197.463,00	100%	88,2%
	10	Penatausahaan Arsip Dinamis				5.000.000,00		4.946.250,00	100%	98,93%
1.04.01	1.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terselenggaranya pengadaan barang milik daerah	bulan	12	81.365.485,00	12	69.556.000,00	100%	85,49%



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2026

Kode Rekening		Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
	02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan	unit	28	81.365.485,00	28	69.556.000,00	100%	85,49%
1.04.01	1.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	bulan	12	479.536.162,00	12	466.471.944,00	100%	97,28%
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat	200	3.000.000,00	200	314.500,00	100%	10,48%
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor Yang Tersedia	bulan	12	476.536.162,00	12	466.157.444,00	100%	97,82%
1.04.01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	persentase	60	506.670.000,00	60	503.866.800,00	100%	99,45%
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit	1	268.020.000,00	1	266.236.250,00	100%	99,33%
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Yang Dipelihara	unit	60	39.150.000,00	60	38.866.750,00	100%	99,28%
	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	unit	3	199.500.000,00	3	198.763.800,00	100%	99,63%
1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				386.827.750,00		346.756.375,00		89,64%
1.04.02	1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Provinsi Sumateara Barat	dokumen	1	303.947.750,00	1	277.233.397,00	100%	91,21%
	11	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Data Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi Yang Tersedia	dokumen	1	303.947.750,00	1	277.233.397,00	100%	91,21%



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2026

Kode Rekening		Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Dan Anggaran Tahn 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Laporan		82.880.000,00		69.522.978,00	100%	83,88%
	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan				82.880.000,00		69.522.978,00	100%	83,88%
1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				2.164.965.500,00		1.953.179.169,00		90,22%
1.04.03	1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penurunan Luas Kawasan Kumuh	persentase	1	186.188.600,00	1	153.209.600,00	100%	82,29%
	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah dokumen kebijakan dan legalisasi untuk bidang perumahan yang disusun	dokumen	1	186.188.600,00	1	153.209.600,00	100%	82,29%
	1.02	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Berkurannnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	persentase	10	1.978.776.900,00	10	1.799.969.569,00	100%	90,96%
	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH pada Kawasan Kumuh Yang Ditangani	unit	20	665.200.000,00	20	641.325.679,00	100%	96,41%
	13	Pelaksanaan Peremajaan kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh Yang Ditangani	Kawasan	6	1.313.576.900,00		1.158.643.890,00	100%	88,21%



Kode Rekening		Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Dan Anggaran Tahn 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	
1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				108.148.836.130,00		106.747.946.417,00		98,7%	
1.04.05	1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Tersedianya PSU Yang Menunjang Fungsi Permukiman	persentase	20	108.148.836.130,00	20	106.747.946.417,00		98,7%	
	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan/DED PSU Permukiman	dokumen	57	6.705.111.450,00	57	6.551.905.364,00	100%	97,72%	
	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah paket kegiatan pembangunan dan peningkatan PSU Permukiman	lokasi	200	101.343.724.680,00	200	100.109.193.203,00	100%	98,78%	
	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU Permukiman	Laporan	1	100.000.000,00	1	86.847.850,00	100%	86,85%	
2		URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					210.088.300,00		190.033.430,00		90,45%
2.10.03		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					46.530.850,00		44.871.300,00		96,43%
2.10.03	1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	persentase	100	46.530.850,00	100	44.871.300,00	100%	96,43%	
	01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Laporan hasil kegiatan pemberitahuan, pendataan awal lokasi, konsultasi publik rencana pembangunan dan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang terlaksana	laporan	1	41.585.850,00	1	40.185.150,00	100%	96,63%	
2.10.04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					80.288.050,00		69.973.380,00		87,15%



Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
			Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
2.10.04 1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas penggunaan dan pemanfaatan tanah garapan	100	80.288.050,00		69.973.380,00	100%	87,15%
	01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan hasil inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah provinsi yang terlaksana	1	45.023.150,00	1	38.145.880,00	100%	84,73%
	02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan hasil mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah provinsi yang terlaksana	1	35.264.900,00	1	31.827.500,00	100%	90,25%
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			43.269.400,00		39.661.750,00		91,66%
2.10.05 1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penyediaan tanah untuk pembangunan	100	43.269.400,00	100	39.661.750,00	100%	91,66%
	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi yang terlaksana	1	43.269.400,00	1	39.661.750,00	100%	91,66%



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2026

Kode Rekening		Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Dan Anggaran Tahn 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
2.10.06		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				40.000.000,00		35.527.000,00		88,82%
2.10.06	1.01	Penetapan Subjek dan Objek Reditribusi Tanah Lintas Daerah Kaupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemanfaatan tanah di Provinsi Sumatera Barat	persentase	100	40.000.000,00	100	35.527.000,00	100%	88,82%
	01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Laporan hasil inventarisasi subjek dan objek reditribusi tanah	laporan	1	40.000.000,00	1	35.527.000,00	100%	88,82%
		TOTAL				120.953.672.630,00		118.719.784.960,00		98,15%



Tabel 2.2

**Tabel C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Pada s/d Tahun 2024
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar**

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar											
Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Pogram dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi										
1.04.01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	85	17	17	17	100%	17	51	60%
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	dokumen	20	4	4	4	100%	4	12	60%
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD Yang Disusun	dokumen	5	1	-	-	-	-	2	20%
03	Koordinas dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD Yang Disusun	dokumen	10	2	-	-	-	-	2	20%
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	dokumen	5	1	-	-	-	-	1	20%
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	dokumen	10	2	-	-	-	-	2	20%
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	dokumen	15	3	3	3	100%	3	9	60%
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulanan	dokumen	20	4	-	-	-	4	12	60%
1.04.01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan Dinas Perkimtan	bulan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	orang	290	58	58	58	100%	58	174	60%



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2026

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar											
Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Pogram dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Honor	orang	175	35	35	35	100%	35	105	60%
03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang Disusun	dokumen	90	18	18	18	100%	-	36	40%
04	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	Kep men 2023	-	-	-	-	4	4	Undefined
1.04.01 1.03	Adiminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi barang milik daerah perangkat daerah	bulan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
01	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%
1.04.01 1.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	meningkatnya disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur	persentase	60	60	-	-	-	60	60	38,33%
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	stel	375	75	-	-	-	75	150	40%
02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat	orang	20	4	-	-	-	7	11	55%
03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek Yang Dilaksanakan	kali	35	7	-	-	-	-	7	20%
1.04.01 1.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum Dinas Perkimtan	bulan	60	12	12	12	100%	60	60	60%
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	buah	830	166	166	166	100%	166	498	60%
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	250	50	-	-	-	-	50	20%
03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	jenis	215	43	1 Paket	1 Paket	100%	43	129	60%



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2026

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Pogram dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis	70	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	12	40	57%
05	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	eksemplar	480	96	96	96	100%	96	288	60%
06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%
1.04.01 1.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terselenggaranya pengadaan barang milik daerah	bulan	60	12	-	-	-	60	60	60%
01	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	unit	130	26	-	-	-	-	26	20%
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Disediakan	Perubahan kepmen	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Perubahan kepmen	-	-	-	-	-	28	28	Undefined
04	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Perubahan kepmen	-	-	-	-	-	1	1	Undefined
1.04.01 1.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa Penunjnag Urusan Perangkat Daerah	bulan	60	12	12	12	100%	60	60	60%
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat	1000	200	1 laporan	1 laporan	100%	200	600	60%
02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Beban Biaya Jasa SIPKD Point dibayarkan	bulan	40	8	1 laporan	1 laporan	100%	-	-	60%
		Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor Yang Tersedia	orang	80	16	16	16	100%	4 laporan	4 laporan	60%



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2026

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar											
Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Pogram dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.04.01 1.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	persentase	60	60	100	100	100%	60	60	60%
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit	5	1	1	1	100%	1	3	60%
		Jumlah kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	unit	40	8	7	7	100%	8	24	60%
02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Yang Dipelihara	unit	275	55	55	55	100%	60	170	62%
03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara/direhab	unit	5	1	-	-	-	3	4	80%
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN										
1.04.02 1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Provinsi Sumateara Barat	dokumen	15	3	3	3	100%	3	7	47%
01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Data Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi Yang Tersedia	dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%
1.04.02 1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Meningkatnya Pemahaman Aparatur Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Pembangunan di Bidang Perumahan	persentase	100	20	-	-	-	-	60	60%



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2026

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Pogram dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi Teknis penyediaan dan Reahbilitasi Rumah kepada Masyarakat Tanggap Bencana\	orang	250	50	-	-	-	-	50	20%
02	Sosialisai Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Reahbilitasi Rumah kepada Masyaakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	orang	250	50	-	-	-	-	50	20%
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN										
1.04.03 1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penurunan Luas Kawasan Kumuh	persentase	63	16,88	12,66	2,36	98%	1	37,98	60%
01	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah dokumen kebijakan dan legalisasi untuk bidang perumahan yang disusun	dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Terlaksana	laporan	5	1	-	-	-	-	1	20%
1.02	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Berkuranngnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	persentase	50	13	8	2,36	98%	10	30	60%
01	Penyusunan Rencana Tapak (sitePlan) dan Detail Engineering Design (DED), Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	Jumlah Dokumen Site Plan Yang Disusun	dokumen	25	5	-	-	-	-	5	20%



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2026

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar											
Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Pogram dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH pada Kawasan Kumuh Yang Ditangani	unit	100	180	20	57	285%	20	257	257%
03	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh Yang Ditangani	kawasan	30	8	6	2	33%	6	16	53%
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)										
1.04.05 1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Tersedianya PSU Yang Menunjang Fungsi Permukiman	persentase	44	30,49	20	108	311%	20	26,13	86%
01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan/DED PSU Permukiman	dokumen	285	57	57	57	100%	57	171	60%
02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah paket kegiatan pembangunan dan peningkatan PSU Permukiman	lokasi	1000	756	200	626	100%	200	1582	158%
03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU Permukiman	laporan	5	1	-	-	-	1	2	40%
2	URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM										
2.10.03 1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	persentase	100	100	100	100	100%	100	300	100%



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2026

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar											
Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Laporan hasil kegiatan pemberitahuan, pendataan awal lokasi, konsultasi publik rencana pembangunan dan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang terlaksana	laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN										
2.10.04 1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas penggunaan dan pemanfaatan tanah garapan	persentase	100	100	100	100	100%	100	100	100%
01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan hasil inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah provinsi yang terlaksana	laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan hasil mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah provinsi yang terlaksana	laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN										
2.10.05 1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penyediaan tanah untuk pembangunan	persentase	100	100	100	100	100%	100	100	100%



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2026

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar											
Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Pogram dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi yang terlaksana	laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE										
2.10.06 1.01	Penetapan Subjek dan Objek Reditribusi Tanah Lintas Daerah Kaupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemanfaatan tanah di Provinsi Sumatera Barat	persentase	100	100	100	100	100%	100	100	100%
01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Laporan hasil inventarisasi subjek dan objek reditribusi tanah	laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
02	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Kep men 2023	-	-	-	-	1	1	Undefined
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT										
2.10.07 1.01	Penetapan Tanah Ulayat Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Ulayat di Provinsi Sumatera Barat	persentase	100	100	-	-	-	100	100	100%
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilaksanakan	laporan	5	1	-	-	-	1	1	20%

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi berdasarkan evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan Tahun 2024 pada kegiatan :
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja terdapat 4 sub kegiatan yang tidak terealisasi sampai saat ini karena tidak digunakan lagi akibat adanya pemutakhiran nomenklatur kode sub kegiatan.
 - Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah terdapat 1 sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yaitu sub kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD karena pemutakhiran nomenklatur.
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdapat 1 sub kegiatan yang tidak terealisasi targetnya karena bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan tidak dianggarkan pada Tahun 2024 terkait efisiensi anggaran dan bimbingan teknis lebih banyak dilaksanakan secara daring akibatnya sub keg ini tidak dapat direalisasikan.
 - Administrasi umum perangkat daerah terdapat satu sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang capaiannya baru 20% karena pada tahun 2024 tidak dianggarkan karena melakukan efisiensi anggaran.
 - Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terdapat 2 sub kegiatan yang realisasinya tidak tercapai sesuai target karena alokasi anggaran yang tidak mencukupi dan perubahan prioritas anggaran akibat adanya kebutuhan mendesak lainnya, sehingga anggaran untuk pengadaan barang terpaksa dialihkan.
 - b. Program Pengembangan Perumahan terdapat dua kegiatan yang tidak terealisasi sesuai rencana yaitu sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi karena kegiatan ini hanya dapat dilakukan jika terjadi bencana alam dengan sasaran adalah masyarakat yang terdampak bencana alam dan akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

- c. Program Kawasan Permukiman terdapat dua sub kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu :
 - Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman karena alokasi anggaran yang tidak mencukupi Tahun 2024 dan akan dilaksanakan pada Tahun 2025.
 - Penyusunan rencana tapak (siteplan) dan Detail Engineering Design (DED), peremajaan/pemugaran permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha tidak dilaksanakan lagi karena adanya pemutakhiran nomenklatur pada Tahun 2023.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari delapan kegiatan. Tujuh kegiatan target capaian kinerja memenuhi serta sesuai dengan yang direncanakan dengan capaian realisasi terhadap capaian renstra lebih kurang 60%.
 - b. Program Pengembangan Perumahan terdapat satu sub kegiatan yaitu Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi yang target capaian kinerja memenuhi serta sesuai dengan yang direncanakan dengan capaian realisasi terhadap capaian renstra lebih kurang 60%.
 - c. Program Kawasan Permukiman terdiri dari dua kegiatan yaitu kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha dan kegiatan Peningkatan kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha. Capaian realisasi kegiatan ini terhadap renstra sesuai dengan rencana target yaitu 60%.
 - d. Untuk urusan bidang pertanahan terdapat empat program yaitu program pengadaan tanah untuk kepentingan umum, program penyelesaian sengketa tanah garapan, program penyelesaian kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dan program redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee realisasi capaian kinerja terhadap renstra dapat memenuhi target sesuai yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Program Kawasan Permukiman terdapat sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha capaian realisasinya terhadap rencana strategis sudah melebihi target sebesar 257% karena banyaknya alokasi anggaran yang bersumber dari aspirasi anggota dewan provinsi untuk penanganan rumah tidak layak huni yang berada di kawasan kumuh.
 - b. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) terdapat terdapat sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman Untuk Menunjang Fungsi permukiman capaian realisasinya terhadap renstra sudah melebihi target sebesar 158% karena banyaknya alokasi anggaran yang bersumber dari aspirasi anggota dewan provinsi untuk menyediakan PSU pada permukiman masyarakat karena pembangunan PSU langsung memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dasar yang layak dan meningkatkan aksesibilitas pada lingkungan permukiman.
4. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :
- a. Penyesuaian beberapa sub kegiatan akibat adanya pemutakhiran nomenklatur, kodifikasi dan perubahan kode rekening menyebabkan target yang sudah ditetapkan pada renstra tidak dapat tercapai.
 - b. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam mewujudkan program-program perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan khususnya dalam penanganan kawasan kumuh provinsi akibatnya target tidak dapat dicapai sesuai dengan rencana.
 - c. Keterbatasan sumberdaya manusia yang kompeten di bidang perumahan dan permukiman untuk melaksanakan program yang terlalu banyak paket pekerjaannya.
 - d. Banyaknya kawasan kumuh kewenangan provinsi yang tersebar di Provinsi Sumatera Barat sedangkan alokasi anggaran terbatas.
5. Implikasi Yang timbul terhadap capaian program renstra adalah :
- a. Capaian tidak memenuhi target :
 - Kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat apabila tidak memenuhi target akan menurunkan kualitas lingkungan dan hidup

masyarakat seperti rendahnya akses terhadap rumah layak dan infrastruktur lainnya

- Kendala dalam mendapatkan alokasi anggaran akan berdampak pada pengurangan alokasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya
 - b. Capaian memenuhi target akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan yang layak dan infrastruktur dasar yang memadai serta peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui kinerja urusan perumahan dan kawawan permukiman.
 - c. Capaian melebihi target akan memberikan implikasi dampak positif terhadap kualitas lingkungan dan masyarakat serta meningkatnya kesadaran berbagai pihak untuk turut serta berperan dalam penyediaan infrastruktur dasar atau PSU Permukiman. Adanya aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang banyak ditujukan untuk penyediaan PSU Permukiman juga memberikan implikasi melebihi target.
6. Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab adalah :
- a. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai
 - b. Mengoptimalkan postur APBD dalam rangka pencapaian target kinerja yang belum tercapai
 - c. Penyesuaian target kinerja dengan kondisi yang ada dan sumberdaya yang tersedia.
 - d. Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi
 - e. Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dinas
 - f. Perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait lainnya
 - g. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk meningkatkan keberlanjutan program

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD



Untuk pencapaian target indikator kinerja terhadap masing-masing sasaran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat di atas didukung oleh beberapa program terkait. Setiap program terdiri dari beberapa kegiatan yang mendukungnya. Terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan-kegiatan.

Evaluasi kinerja merupakan analisa terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja terhadap target indikator yang telah ditetapkan sebelumnya pada Penetapan Kinerja.

Adapun sasaran Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan kawasan Permukiman	Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	18,90%	17,54%	93,33%
2		Meningkatnya PSU Permukiman	Persentase Peningkatan PSU Permukiman	51,77%	76,50%	147,94%
3		Meningkatnya Meningkatkan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana.	100%	100%	100%
			2. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase masalah Pertanahan Yang Ditangani	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,6)	BB (70,87)	100,38%
6		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85%	89%	105%

Sasaran Strategis adalah jabaran tujuan yang akan dilaksanakan untuk lima tahun ke depan dengan capaian target kinerjanya dalam jangka waktu tahunan pada dinas terdiri atas enam (6) sasaran dengan target kinerja sama dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026. Sasaran strategis 1 yaitu menurunnya kawasan kumuh untuk Tahun 2024 dilakukan perubahan target dari 4,73% menjadi 18,90% karena adanya peningkatan penanganan dan penambahan anggaran agar target sesuai dokumen dapat tercapai. Sasaran Strategis 2 juga dilakukan perubahan target dari 34,51% menjadi 51,77% karena adanya penambahan anggaran melalui dana usulan dari aspirasi anggota legislatif Provinsi Sumatera Barat. Sasaran Strategis 3, 4, 5 dan 6 tidak mengalami perubahan target tetap dilaksanakan sesuai dengan target Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026.

Tabel 2. (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	✓		4,73%	18,90%	38,4%	35,4%	137,84 %	17,64%			Indikator ini diperkirakan sampai tahun 2025 tidak dapat mencapai target penanganan 6 kawasan kumuh setiap tahunnya karena alokasi anggaran terbatas
2	Persentase Peningkatan PSU Permukiman		✓	34,51%	51,77%	69,03%	86,3%	60,60%	76,50%			Penyediaan PSU Permukiman akan selalu melebihi target 200 lokasi setiap tahun karena banyaknya usulan aspirasi anggotadewan pada kegiatan
3	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana.	✓		100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100%	100%	100%	100%	Indikator ini merupakan SPM Bidang Perumahan terkait kebencanaan dan sampai



												saat ini tidak ada bencana provinsi
4	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi	✓		100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100%	100%	100%	100%	Indikator ini merupakan SPM Bidang Perumahan terkait relokasi tidak ada program pemerintah yang mengakibatkan relokasi
5	Persentase masalah Pertanahan Yang Ditangani		✓	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Permasalahan Pertanahan yang ditangani seluruhnya telah difasilitasi sesuai dengan kategori dan kewenangan
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD			BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	Peningkatan nilai kinerja dari B menjadi BB
7	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi			85%	85%	85%	85%	85%	82,2%	85%	85%	Indikator penilaian pelayanan publik

Hasil pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut :

a. Persentase Penurunnya Kawasan Kumuh

Indikator kinerja persentase penurunan kawasan kumuh dengan target capaian pada Tahun 2024 18,90%. Penanganan kawasan kumuh definisi operasionalnya adalah mengurangi kekumuhan pada kawasan tertentu yang ditetapkan sebagai kawasan kumuh melalui surat keputusan kepala daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan SK Kawasan Kumuh dari kabupaten/kota telah ditetapkan luas kawasan kumuh di Provinsi Sumatera Barat adalah 5.226,97 hektar yang terdiri dari kawasan kumuh kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan 5kewenangan kabupaten/kota. Untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan penanganan kawasan kumuh dengan luasan 10-15 hektar dengan jumlah 79 kawasan atau 1.254,94 hektar dengan target penanganan pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebanyak 28 kawasan atau 352 hektar yang merupakan kawasan kumuh kategori kumuh sedang. Capaian kinerja untuk penurunan kawasan kumuh

ditarget menangani kawasan kumuh kewenangan provinsi sebanyak 6 kawasan atau 7,09% setiap tahunnya. Target 7,09% merupakan persentase dari target kawasan setiap tahun dibandingkan dengan jumlah total kawasan kumuh kewenangan provinsi yakni 79 kawasan artinya untuk penanganan satu kawasan diasumsikan nilai capaiannya adalah 1,18%. Untuk Tahun 2024 kinerja penanganan kawasan kumuh target awal sesuai renstra adalah 14,18% namun dilakukan peningkatan target menjadi 18,90% karena adanya peningkatan penanganan dan penambahan anggaran agar target sesuai dokumen dapat tercapai. Target 18,90% adalah target terhadap penanganan 5 kawasan kumuh dengan asumsi setiap kawasan kumuh yang ditangani walaupun hanya satu indikator yang ditangani dianggap kawasan tersebut sudah ada penurunan terhadap kondisi kumuh karena kawasan kumuh provinsi yang ditanggulangi sebagian besar merupakan kawasan kumuh kategori sedang bukan kawasan kumuh kategori berat. Target luas kawasan kumuh Tahun 2024 untuk 5 kawasan adalah 58,68 hektar dan realisasi capaian luas kawasan kumuh yang ditangani Tahun 2024 adalah 62,12 hektar berlokasi di Kawasan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Kawasan Cupak Kabupaten Solok, Kawasan Sawah Aro Kota Solok dan Kawasan Sasak Kabupaten Pasaman Barat dengan capaian kinerja 93,33%

b. Persentase Peningkatan PSU Permukiman

Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman merupakan kelengkapan fisik sebagai infrastruktur dasar untuk mendukung terwujudnya permukiman yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk menunjang fungsi permukiman sehingga kualitas permukiman menjadi meningkat dan masyarakat memiliki aksesibilitas yang mudah dan lancar. Komponen PSU untuk permukiman meliputi sebagian dari salah satu atau lebih komponen : jalan, drainase, air limbah, persampahan, air minum, proteksi kebakaran, ruang terbuka hijau dan penerangan jalan umum. Penyediaan PSU permukiman merupakan salah satu urusan perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil perhitungan evaluasi yang dilakukan dengan formulasi diperoleh nilai capaian dalam kategori sangat baik. Penyediaan PSU permukiman ditarget dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Tahun 2021-2026 adalah 1000 lokasi dengan target penanganan PSU pertahun 200 lokasi atau 8,71 %. Lokasi permukiman tersebut didasarkan pada data jumlah nagari/kelurahan/desa di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 adalah 1.159 nagari/desa/kelurahan. Penanganan PSU Permukiman pada Tahun 2024 dilaksanakan dengan melakukan penyediaan PSU di lingkungan permukiman sebagai penunjang fungsi permukiman dengan target 51,77% dan realisasi sebesar 76,50% serta capaian kinerja 147,77%.

Capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi peningkatan yang dilaksanakan pada 765 lokasi permukiman yang tersebar di enam belas kabupaten/kota. Peningkatan lokasi penanganan PSU permukiman pada Tahun 2024 karena adanya penambahan anggaran melalui dana usulan dari aspirasi anggota legislatif Provinsi Sumatera Barat.

c. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana dan Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi

Indikator ini merupakan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan yang di dasari oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang didalamnya menjelaskan tentang pelaksanaan bantuan rumah pasca bencana dan relokasi akibat program pemerintah. Peraturan ini menggaris bawahi tentang pembangunan baru yang berubah lokasi pembangunan kembali dengan lokasi tetap, bantuan membayar uang sewa, rehabilitasi peningkatan kualitas bagi warga yang rumahnya terkena bencana.

Standar Teknis SPM Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar dan Penerima Pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Perumahan Daerah Provinsi terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi. Fasilitasi tersebut dapat berupa pendampingan/pembinaan, pembimbingan, penyuluhan, pelayanan informasi dan bantuan teknis.

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Perumahan Daerah Provinsi terdiri atas mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

Penerima Pelayanan pada SPM Bidang Perumahan Daerah Provinsi terdiri atas penerima pelayanan dasar dari penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi.

Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang merupakan kewenangan Provinsi pada tahun 2024 adalah 100%. Untuk capaian kinerja terkait Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan ini kinerjanya diukur dengan melaksanakan salah satu kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 akan dinilai 100% tidak harus merealisasikan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan bencana atau relokasi program. Hal ini disebabkan karena tidak ada bencana alam dan program relokasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Realisasi kinerja sasaran strategis ini pada Tahun 2024 dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan identifikasi terhadap rumah yang berada di kawasan rawan bencana dan sosialisasi terkait kebencanaan

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
2. Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
3. Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m² dan luas tanah minimal 60 m².

4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.

Kualitas barang dan jasa pada pelayanan dasar ini adalah 100%, karena tidak ada bencana alam pada Tahun 2024 yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Mutu pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

- a) Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan.

Adapun cara Perhitungan Capaian SPM Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- b) Kualitas Barang/Jasa Pelayanan Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu :
 1. Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian *appraisal* berdasarkan NSPK yang berlaku
 2. Subsidi Uang Sewa Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal
 3. Penyediaan Rumah Layak Huni Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus. Kualitas

rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana gempa sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria.

Yang menjadi permasalahan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah :

1. Belum sinerginya upaya implementasi pencapaian SPM karena masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan tercapainya pelayanan dasar di bidang perumahan rakyat kawasan permukiman.
2. Ketersedian data dan informasi yang cukup terbatas dan kurang valid, sangat berdampak terhadap implementasi capaian target penerapan indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman. Data dan informasi yang digunakan akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penetapan target sasaran dan tujuan dari masing-masing indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman.
3. Masih rendahnya kualitas perencanaan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam pencapaian SPM.
4. Lemahnya komitmen dan kemampuan dalam mengelola menyelenggarakan pengembangan pembangunan suatu kawasan perumahan dan permukiman sehingga banyaknya terjadi pembangunan perumahan dan permukiman pada lahan yang merupakan bukan lahan permukiman.
5. Secara fisik kondisi daratan Provinsi Sumatera Barat umumnya berupa perbukitan dan pegunungan sehingga membutuhkan kehati-hatian agar dalam melakukan pembangunan tidak menimbulkan bencana alam, terutama tanah longsor. Provinsi Sumbar mempunyai luas daerah daratan sekitar 42.297,30 km², dengan luas perairan (laut) $\pm$ 52.882,42 km² dengan total garis pantai keseluruhan $\pm$ 1.637 km. Karakteristik alam yang berbukit dan bergunung dimana kawasan hutan lebih luas (60,53%) dibandingkan luas kawasan non hutan (39,47%). Hal ini menjadi terbatasnya pemanfaatan ruang untuk budidaya (permukiman).
6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membangun rumah pada kawasan yang aman atau berada di luar kawasan negative list (sempadan rel KA, bawah SUTET, bantaran Sungai dsb).

d. Indikator Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani

Bidang pertanahan memiliki indikator Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani dengan target kinerja 100%.



Upaya yang dilakukan untuk mencapai target dari Sasaran Strategis :

- a. Fasilitasi penyelesaian sengketa atau masalah pertanahan yang diadukan masyarakat.

Tabel
Masalah Pertanahan Yang Di Fasilitasi Tahun 2024

NO	JENIS MASALAH	LOKASI	PROGRES/TINDAK LANJUT
1.	Progres Pembebasan Lahan Atau Penyelesaian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol seksi Padang- Sicincin, Sta. 0-Sta.36,6	- Kota Padang - Kab. Padang Pariaman	1. Sta. 0-Sta. 4,2 Km : Total 129 Bidang, Luas 26 Ha, 100 % bebas. 2. Sta. 4,2 – Sta. 36,6 Km : - Total 1.499 Bidang - Total Luas : 290,36 Ha - Bebas : 1.445 Bidang (96%) - Belum bebas : 54 Bidang (5,07%), dengan rincian : a. 51 Bid proses pengajuan konsinyasi, b. 17 Bid proses pembayaran LMAN, c. 8 Bid proses penilaian Per 26 Juni
2.	Fasilitasi Penyelesaian Masalah konsolidasi tanah Pembangunan Jalan Padang By-Pass.	Kota Padang	Proses pengecekan administrasi pertanahan
3	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah Pembangunan Jalan Ketaping (BIM) – Pariaman Kabupaten Padang Pariaman yang di klaim oleh sdr. Defri Hayati.	Kab. Padang Pariaman	a. DLHPKPP Kab Padang Pariaman akan menelusuri semua data terkait tanah tersebut pada OPD dan Instansi terkait. b. Pada masyarakat pemilik lahan diminta secepatnya mengajukan ke pengadilan untuk mendapatkan haknya kembali, karena sudah lama tidak menguasai lahan yang sudah dimilikinya.
4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah Pembangunan BP2IP an. Hj. Eni Asmar di Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, tanggal 15 Juli 2024	Kota Padang	a. Masyarakat pemilik lahan yang bersengketa ini an. Arniati beralamat jalan Swausaha Bukit Atas, Kelurahan Indarung Kota Padang. Dia menyebut dirinya korban Eksekusi Pengadilan Negeri dengan salinan putusan nomor 79/pdt.G/2022/PN Pdg yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024, atas tuntutan keponakan orang yang menjual tanah dimaksud kepadanya. b. Kemenangan pihak yang menuntut tersebut dikarenakan bukti-bukti surat yang dia punya adalah milik korban, pada saat siding dipengadilan tidak pernah dia hadir, langsung saja dikabarkan kalah dipengadilan, sehingga berujung Eksekusi. c. Perolehan tanah tersebut dengan jual beli pada tahun 1982, tapi baru diberi bukti jual beli diatas segel atau materay pada tahun 1994 dan ditandatangani oleh yang punya tanah asal. d. Banyak kejanggalan yang dirasakannya menyangkut permasalahan tanah ini. e. Tapi setelah kami dapatkan informasi terkait tanah yang di ekskusi tersebut, lurah Indarung memang hadir saat eksekusi, namun belum dapat memberikan



NO	JENIS MASALAH	LOKASI	PROGRES/TINDAK LANJUT
			data dan tidak memiliki berkas terkait tanah masyarakat dimaksud, dan berjanji akan mencarikan arsip terkait permasalahan masyarakat ini.
5	Fasilitasi penyelesaian masalah tanah objek perkara yang telah mempunyai Hukum tetap dengan PT. Jihad Heksa Insani pemilik lahan terkena lokasi Pembangunan jalan Inspeksi dan Normalisasi Sungai Batang Kandis di Kelurahan Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang, di mana perkara dimenangkan oleh Sdr. Hamid, dan tanah seluas 3.000 m2 milik PT. Jihat Heksa Insani (sekarang terkena rencana Pembangunan jalan Inspeksi dan Normalisasi Sungai Batang Kandis) menjadi milik Sdr. Hamid, tanggal 24 Juli 2024	Kota Padang	a. Saudara Hamid merupakan masyarakat yang terkait masalah tanah Objek perkara yang telah mempunyai Hukum Tetap dengan PT. Jihad Heksa Insani pemilik lahan terkena lokasi Pembangunan jalan Inspeksi dan Normalisasi sungai Batang Kandis di Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Kototangah Padang, dimana Perkara dimenangkan oleh Sdr. Hamid, dan tanah seluas 3000 m2 milik PT. Jihad Heksa Insani (sekarang terkena rencana Pembangunan Jalan Inspeksi dan Normalisasi Sungai Batang Kandis) menjadi milik Sdr. Hamid b. Terkait dengan objek perkara ini terkena rencana pembangunan jalan Inspeksi dan Normalisasi Sungai, pihak BWSS V Sumbar menyampaikan bahwa tanah ini sudah mendapat ganti kerugian dari BWSS V, yang dibayarkan kepada PT. Jihad Heksa Insani pemilik lahan pada tahun 2008, tapi bukti pembayaran tidak bisa diperagakan karena diduga terkena bencana gempa kota Padang pada tahun 2009. c. Perolehan tanah tersebut dengan pembayaran gaji Sdr. Hamid sebagai operator pembukaan lahan perumahan oleh PT. Jihad yang tidak dibayarkan, sehingga dituntut kepengadilan, sampai mendapatkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap, dimana Perkara dimenangkan oleh Sdr. Hamid, dan tanah seluas 3000 m2 milik PT. Jihad Heksa Insani (sekarang terkena rencana Pembangunan Jalan Inspeksi dan Normalisasi Sungai Batang Kandis) menjadi milik Sdr. Hamid d. Sertifikat tanah lokasi dimaksud ada ditangan Notaris Elli Satria Pillo untuk dilakukan pemecahan Sertifikat tersebut, namun sampai saat ini pemecahan sertifikat tidak terlaksana sampai sekarang ini. e. Tapi setelah kami dapatkan informasi terkait tanah tersebut, Lurah Batipuh Panjang, BWSS V Sumbar memang mengetahui permasalahan tanah tersebut, namun belum dapat memberikan data dan tidak memiliki berkas terkait tanah masyarakat dimaksud, dan berjanji akan memberikan ganti kerugian kalau Sdr. Hamid dapat memberikan data dan dokumen kepemilikan yang syah dari tanah yang terkena rencana pembangunan jalan Inspeksi Pengendalian Banjir dan Normalisasi Sungai Batang Kandis
6	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Bangunan di atas tanah an. Yusneli Gami terkena Pembangunan Poltekpel Sumbar	Kab. Padang Pariaman	a. Pada pelaksanaan sidang Aanmaning yang dituangkan dalam Berita Acara Aan maning Perdata Nomor 47 No 47/Pdt.G/2019.Pmn tanggal 28 November 2023, yang dihadiri oleh Pemohon Eksekusi (dahulunya Penggugat) dan para Termohon Eksekusi (dahulunya Para Tergugat), telah disepakati bahwa pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dilaksanakan secara sukarela dengan cara tanggung renteng sebagai berikut :



NO	JENIS MASALAH	LOKASI	PROGRES/TINDAK LANJUT
			- Termohon Eksekusi A (Gubernur Sumatera Barat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 47/Pdt.G/2019.Pmn tanggal 5 Maret 2020 poin nomor 11 dalam pokok perkara yaitu sejumlah Rp. 3.117.000,- (tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah). - Termohon Eksekusi B (Direktur Poltekpel Sumbar) bersedia membayar sesuai dengan Amar Putusan Perkara Perdata Perdata Nomor 47/Pdt.G/2019.Pmn tanggal 5 Maret 2020 poin nomor 9 dalam pokok perkara yaitu sejumlah Rp.113.415.000,- (serratus tiga belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah) yang uang tersebut diserahkan ke Pengadilan Negeri Pariaman. b. Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan ke Poltekpel Sumbar dan Pemkab Kab. Padang Pariaman, tanggal 14 Oktober 2024 c. Fasilitasi penyelesaian masalah ganti rugi tanah, mengikuti siding lapangan perkara perdata No. 31/Pdt.G/2024/PNPmn an. Ani Asmar Aslim terkait tanah pembangunan Sekolah Politeknik Pelayaran Sumbar di nagari Tapakis Kab. Padang Pariaman tanggal 4 November 2024 d. Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka menindaklanjuti pembayaran biaya perkara perdata sesuai amar putusan perkara perdata Nomor: 47/PDT.G/2019/PN.Pmn, tanggal 5 Maret 2020, poin nomor 11 dalam pokok perkara yaitu sejumlah Rp. 3.117.000 (tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah), dan Berita Acara aanmaning perdata No: 47/PDT.G.2019/PN.Pmn. tanggal 28 November 2023, perlu dilakukan koordinasi ke Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 6 November 2024 e. Fasilitasi penyelesaian masalah ganti rugi tanah, mengikuti sidang lanjutan perkara perdata No. 31/Pdt.G/2024/PNPmn untuk mendengarkan keterangan dari pihak pengugat terkait tanah an. Ani Asmar Aslim yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Poltekpel Sumbar di Pengadilan Negeri Kota Pariaman tanggal 13 November 2024 dengan hasil : - penggugat yang diwakili oleh kuasa Hukum Ani Asmar, menghadirkan 2 (dua) orang saksi terkait objek perkara. - Pada kesempatan tersebut dilakukan pemeriksaan saksi yaitu saksi pertama Ali Amran dan Saksi ke dua Sultoni terkait identitas diri yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah para saksi perkara. - dilanjutkan dengan pertanyaan – pertanyaan untuk mendapatkan informasi dan keterangan dari kedua saksi tersebut terkait dengan objek perkara, yang mana pemeriksaan dilakukan



NO	JENIS MASALAH	LOKASI	PROGRES/TINDAK LANJUT
			secara bersamaan baik dari pihak penggugat maupun dari tergugat, serta pertanyaan dari Hakim Ketua sendiri.
7	Fasilitasi Penyelesaian masalah ganti kerugian tanah Pembangunan jalan tol Padang – Sicincin yang berlokasi di Tarok City Nagari Kapalo Hilalang Kab. Padang Pariaman an. Hanafi dkk	Kab. Padang Pariaman	a. Melakukan koordinasi ulang ke Kab. Padang pariaman, agar dapat dengan segera menyelesaikan seluruh kelengkapan dokumen dan adminstrasi yang diperlukan untuk pembayaran ganti kerugian atas sisa tanah 3 bidang tanah (an. Hanafi cs) yang belum selesai pengadaan tanahnya untuk pembangunan jalan simpang Pasa Limau – Tarok (exit Tol). b. Disarankan kepada kepala DLHPKPP kab. Padang Pariaman segera mengambil Langkah kebijakan untuk penyelesaiannya sesuai dengan tahapan/mekanisme pengdaan tanah menurut perturan perundangundangan yang berlaku. c. Fasilitasi percepatan penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah an. Hanafi CS dalam pengadaan tanah pembangunan jalan Simpang Pasa limau Tarok City Exit Tol di Nagari Kapalo Hilalang kab. Padang Pariaman, tanggal 10 Oktober 2024, d. Pelaksanaan kordinasi untuk mengikuti siding lapangan dalam penyelesaian Perkara Perdata nomor 31/PDT.G/2024/Pn.Pmn terkait tuntutan Pembayaran Ganti Rugi tanah an. Eni Asmar Aslim seluas 12.000 m2 di lokasi Poltekel Sumbar di Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 4 November 2024 e. Pelaksanaan kordinasi masalah ganti kerugian tanah Hanafi Cs yang terkena pembangunan jalan tol tarok city ke Kantor Badan Pertanahan kab. Padang Pariaman pada tanggal 5 November 2024
8	Fasilitasi penyelesaian masalah ganti rugi tanah, terkena pembangunan jalan Pasa Sago-Painan Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Proses pengecekan administrasi pertanahan
9	Fasilitasi penyelesaian masalah ganti rugi tanah yang diklaim sdr. Hasan Samudera Kota Padang	Kota Padang	Proses pengecekan administrasi pertanahan

- b. Fasilitasi penerbitan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sesuai dengan permohonan atau Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang diajukan oleh instansi yang memerlukan tanah ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.



Pada tahun 2024, telah dilaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu :

Tabel
Daftar Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Tahun 2024

No	PENETAPAN LOKASI	PROGRES
1.	Penetan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Penambahan Lahan Bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Kandis (Tanggul, Jalan Inspeksi dan Disposol) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat	1. Konsultasi Publik 1 tanggal 5 Januari 2024 2. Konsultasi Publik 2 tanggal 8 Januari 2024 3. Konsultasi Publik 3 tanggal 26 Januari 2024 4. Konsultasi Publik lanjutan tanggal 23 Februari 2024 5. Berdasarkan Kesepakatan Lokasi Pembangunan hasil konsultasi public dimaksud, telah berhasil diterbitkan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Penambahan Lahan Bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Kandis (Tanggul, Jalan Inspeksi dan Disposol) di Kota Padang dengan Keputusan Gubernur Nomor 600-218-2024 tanggal 13 Maret 2024.
2.	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Pembangunan Jalan Tol Seksi Padang-Sicincin Sta 4+200- 36+600 (Pembaharuan Penlok karena Penlok lama telah habis jangka waktunya pada tanggal 25 Maret 2024).	1. Penyampaian Pembaharuan Dokumen Perencanaan (DPPT) Sisa Tanah yang belum bebas dari Ditjen BM Kemen PUPR tanggal 19 Maret 2024, 2. Penyiapan Draft SK Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas Sisa Tanah ke Biro Hukum tanggal 22 Maret 2024. 3. Pembaharuan Penetapan Lokasi Atas Sisa Tanah belum bebas pada Jalan Tol Sta.4,2- Sta. 36,6 Km, terbit dengan SK Gubernur Nomor 620-268-2024 tanggal 27 Maret 2024.
3.	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik Panjang : 2,7 Km Luas : 18,7 Ha Letak :Kel. Indarung dan Kel. Batu Gadang, Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang	1. Surat Penyampaian Dokumen Perencanaan (DPPT) dari Dirjen Bina Marga Kemen PUPR ke Gubernur No. Ps0102- Db/147 tanggal 19 Februari 2024, 2. Pembentukan TimVerifikasi, SK Gubernur Nomor 620-183-2024 tanggal 22 Februari 2024, 3. Rapat Verifikasi tanggal 26 Februari 2024, terdapat kekurangan kesesuaian tata ruang seluas □} 8,6 Ha karena masuk kawasan hutan lindung. 4. Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah SK Gubernur Nomor 600-215-2024 tanggal 8 Maret 2024. 5. Rapat Koordinasi tingkat Pusat dan Daerah tanggal 6 Maret 2024, dan tanggal 13 Maret 2024, disimpulkan



No	PENETAPAN LOKASI	PROGRES
		proses penlok secara simultan dengan pengurusan izin kehutanan oleh PT Utama Karya, dan jika dimungkinkan diterbitkan Penlok Bertahap sambil menunggu izin kehutanan. 6. Survei kawasan hutan bersama BPKH Medan dan OPD terkait tanggal 15 Maret 2024. 7. Tim Persiapan telah melaksanakan sosialisasi dan pendataan 8. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik Tahap Pertama dengan Luas Lahan ± 10,1 Ha di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 5 April 2024, dengan SK Gubernur Nomor 620-294- 2024. 9. Pada tanggal 13 Agustus 2024 dilakukan rapat upaya percepatan pengadaan tanah. Untuk Sisa tanah seluas ± 8,6 Ha yang merupakan kawasan Hutan dapat diterbitkan Penetapan Lokasinya setelah KKPR dan Izin Penggunaan Kehutanan (IPPKH) di terbitkan oleh instansi terkait. 10. Terkait pelaksanaan Pengadaan Tanah sesuai Penetapan Lokasi Tahap Pertama 11. Terhadap isu adanya klaim Sdr Ridwan atas kepemilikan tanah disebagian Kawasan Hutan, maka untuk mengantisipasi permasalahan dikemudian hari akan dilaksanakan rapat teknis dengan melibatkan dinas Kehutanan dan instansi terkait
4.	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas sisa tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang sepanjang 32,4 Km, STA 4+200-STA 36+600 (Pembaharuan Penlok karena penlok lama telah habis jangka waktunya pada tanggal 25 Maret 2024)	1. Penyampaian Pembaharuan Dokumen Perencanaan (DPPT) sisa Tanah yang belum bebas dari Ditjen BM KemenPUPR tanggal 19 Maret 2024; 2. Penyiapan Draf SK Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas Sisa Tanah ke Biro Hukum tanggal 22 Maret 2024; 3. Target akhir maret 2024 terbit Pembaharuan Penetapan Lokasi Atas Sisa Tanah belum bebas pada tol Sta. 4,2 – Sta. 36,6 KM
5.	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Akses Jalan Tol Lubuk Alung dan Simpang Tarok City Luas : 26,55 Ha Letak: 1. Kecamatan Lubuk Alung, 2. Kecamatan 2x11 Kayu	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Akses Tol Lubuk Alung dan Simpang Tarok City Ruas Jalan Tol Pekanbaru- Bangkinang Payahkumbuh-Bukittinggi-Padang Seksi Kapalo Hilalang-Padang di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 28 Juni 2024 dengan SK Gub Nomor 600-461-



No	PENETAPAN LOKASI	PROGRES
		2024
6.	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Jalan Rokot-Sioban_Katiet	1. Konsultasi public pada tanggal 25 Maret 2024 di Kantor Camat Sipora Selatan. Kesepakatan masyarakat bersedia tidak menerima ganti rugi tanah dan hanya menerima ganti rugi bangunan dan tanaman, tertuang dalam berita acara kesepakatan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Rokot-SiobanKatiet nomor 600.1.8/174/SETDA tanggal 25 Maret 2024, dihadiri dan ditanda tangani oleh Panitia Persiapan Pengadaan Tanah (ditetapkan dengan SK Bupati nomor 100.3.3.2-98 tahun 2024 tanggal 5 Februari 2024) dan Masyarakat/Pihak yang berhak menandatangani Berita Acara tersebut. 2. Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Bupati Kepulauan Mentawai, dengan SK Gubernur No. 590- 706-2023 tanggal 17 Oktober 2023 ke Bupati Kepulauan Mentawai sehingga terbit Penlok dengan SK Bupati Nomor 100.3.3.2-145 tahun 2024 tanggal 22 April 2024 (berupa bangunan dan tanaman masyarakat terkena lokasi pembangunan).
7.	SK Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 120 – 881 – 2023 tentang pendelegasian pelaksanaan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah Proses Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Suliti dan Bangko Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan kepada Bupati Solok Selatan	Penyampaian Lembar Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang dengan nomor surat : 600/42/DPUTRP/II/2024, tanggal 26 Februari 2024, yang isinya menyampaikan bahwa terdapat beberapa poin muatan yang belum tertera.belum lengkap/belum sesuai pada dokumen perencanaan pengadaan tanah pembangunan sarana dan prasarana Batang Suliti dan Bangko di Kec. Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan
8.	SK Gubernur Provinsi Sumatera Barat nomor : 590-706- 2023, tanggal 17 Oktober 2023. Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Pelebaran Ruas Jalan Rokot – Sioban – Katiet di Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Bupati Kepulauan Mentawai	Pelaksanaan Koordinasi pembahasan dan pembinaan ke Kab. Kepulauan Mentawai tanggal 14 sd 16 Agustus 2024 dengan hasil Semua masyarakat yang terdampak oleh pembangunan pelebaran jalan dimaksud setuju, sehingga dengan SK Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-145 tahun 2024 tanggal 22 April 2024 ditetapkan Penetapan Lokasi Pangadaan Tanah Pembangunan Pelebaran Ruas Jalan Rokot-Sioban-Katiet di Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten



No	PENETAPAN LOKASI	PROGRES
		Kepulauan Mentawai.
9.	SK Gubernur Provinsi Sumatera Barat nomor : 620-404- 2024, tanggal 28 Mei 2024. Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Perkantoran Terpadu Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Bupati Kepulauan Mentawai	Pelaksanaan Verifikasi Tahapan Persiapan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Pembangunan Daerah Irigasi Batang Bayang-Lanjutan di Kabupaten Pasaman Barat, dengan SK nomor : 600-699-2024, tanggal 24 September 2024
10.	SK Gubernur Provinsi Sumatera Barat nomor : 600 – 699 - 2024, tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Pembangunan Daerah irigasi Batang bayang-Lanjutan di kabupaten Pasaman barat Provinsi Sumatera Barat	Pelaksanaan Verifikasi Tahapan Persiapan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Pembangunan Daerah Irigasi Batang Bayang-Lanjutan di Kabupaten Pasaman Barat, dengan SK nomor :600-699-2024, tanggal 24 September 2024.
11.	Fasilitasi Pengadaan Tanah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Sumpur, di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, tanggal 26 sd 27 September 2024.	Kebutuhan Luas Tanah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Pengadaan tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir Batang Sumpur, di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman adalah ± 266.997 m2 (26,69 Ha).
12.	Fasilitasi perencanaan persiapan pengadaan sisa tanah exit jalan tol di Simpang Tarok City Nagari Kapalo Hilalang- Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 3 Oktober 2024.	Dilakukan proses ulang penlok untuk keabsahan penloknya, gunakan appraisal yang lama dengan penilaian baru walaupun masih senilai yang lama, dengan peta bidang lama tapi ganti nama dari Arabima ke Hanafi Cs.
13.	Pelaksanaan Pemberitahuan, Pendataan Awal, Konsultasi Publik dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana DI Batang Bayang di Kec. Lembah Melintang Kab.Pasaman Barat, tanggal 8 sd 9 Oktober 2024.	Kegiatan Pembebasan lahan (lanjutan) dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana DI Batang Bayang di Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat ini seluas 166,633m2 (16,66 Ha) berada pada 3 Nagari, yakni Nagari Koto Sawah, Nagari Koto Gunung, dan Nagari Salido Saroha di Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat
14.	SK Gubernur Provinsi Sumatera Barat nomor : 590-706- 2023 tanggal 17 Oktober 2023. Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Pelebaran Ruas jalan Rokot – Sioban – Katiet di Kab. Kepulauan Mentawai	Permasalahan tanah dikeulauan Mentawai sekarang masalah pelepasan Hak Milik Adat seluas 115,8 Hektar yang terletak di Desa Matobe, Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai

- c. Mengkoordinasikan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah bagi penyediaan tanah bagi pembangunan, antara lain:
1. Koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian pengadaan tanah Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol seksi Padang-Sicincin, Sta. 0-Sta.36,6
 2. Koordinasi penyelesaian masalah Fasilitasi Penyelesaian Masalah konsolidasi tanah Pembangunan Jalan Padang By-Pass

3. Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah Pembangunan Jalan Ketaping (BIM) – Pariaman Kabupaten Padang Pariaman yang di klaim oleh sdr. Defri Hayati.
4. Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah Pembangunan BP2IP an. Hj.Eni Asmar di Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, tanggal 15 Juli 2024
5. Koordinasi penyelesaian masalah tanah objek perkara yang telah mempunyai Hukum tetap dengan PT. Jihad Heksa Insani pemilik lahan terkena lokasi Pembangunan jalan Inspeksi dan Normalisasi Sungai Batang Kandis di Kelurahan Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang, di mana perkara dimenangkan oleh Sdr. Hamid, dan tanah seluas 3.000 m2 milik PT. Jihad Heksa Insani
6. Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Bangunan di atas tanah an. Yusneli Gami terkena Pembangunan PoltekpelSumbar
7. Koordinasi Penyelesaian masalah ganti kerugian tanah Pembangunan jalan tol Padang – Sicincin yang berlokasi di Tarok City Nagari Kapalo Hilalang Kab. Padang Pariaman an. Hanafi dkk
8. Koordinasi penyelesaian masalah ganti rugi tanah, terkena pembangunan jalan Pasa Sago-Painan Kab. Pesisir Selatan
9. Koordinasi penyelesaian masalah ganti rugi tanah yang diklaim sdr. Hasan Samudera Kota Padang

e. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Tujuan ketiga dari pohon kinerja adalah meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani dicapai dengan menetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja OPD. Tujuan Meningkatnya Kinerja Organisasi adalah untuk mengukur kinerja organisasi dengan menerapkan akuntabilitas untuk menilai keberhasilan atau kegagalan outcome pelaksanaan program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja.

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target BB untuk tahun 2024. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ini pengukurannya diambil dari penilaian yang dilakukan oleh tim terhadap laporan kinerja dinas tahun 2023 dengan nilai BB atau capaian sebesar 101,03%. Pencapaian target atas sasaran strategis ini merupakan data hasil evaluasi LAKIP OPD dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Nilai evaluasi LAKIP Tahun 2023 tidak dapat dijelaskan pada laporan ini

karena hasil penilaian baru akan diterima pada bulan Maret 2023. Nilai yang disampaikan pada target kinerja adalah nilai LAKIP Tahun 2023. Acuan yang digunakan dalam menentukan penetapan hasil evaluasi atas laporan kinerja instansi pemerintah adalah data yang bersumber dari Hasil Evaluasi atas LAKIP oleh Inspektorat Provinsi dan peraturan sebagai dasar evaluasi adalah Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Provinsi pada tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah BB dengan besaran nilai 70,72. Realisasi nilai B ini sudah sesuai dengan nilai yang ditarget dan masuk dalam kategori baik. Perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 nilai evaluasi LAKIP yang diperoleh adalah BB dengan nilai 70,72 yang masuk kategori sangat baik. Jadi nilai LAKIP yang dicapai menunjukkan kenaikan yang sangat baik. Pencapaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026 yaitu target nilai pada kategori BB pada Tahun 2024 dengan adanya kenaikan nilai akuntabilitas kinerja tata kelola organisasi secara teknis. Diharapkan sampai akhir periode rencana jangka menengah target dapat dicapai atau melebihi dari yang direncanakan dengan nilai BB atau sangat baik.

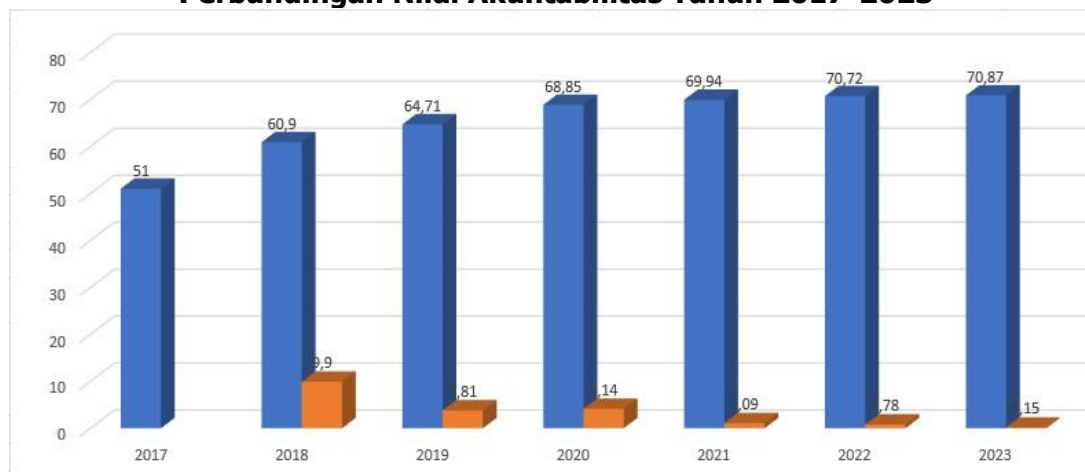
Tabel
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 5 Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sasaran Strategis 5	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian		
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B	BB	B (70,72)	BB (70,87)	100%	100,38%	

Dari tabel diatas dapat dilihat Nilai LAKIP dari Tahun 2023 naik 0,15 point dari nilai Tahun 2022 dengan capaian nilai BB termasuk kategori sangat baik artinya akuntabilitas kinerjanya sudah sangat baik memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Penilaian akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dimulai pada tahun 2017 yang merupakan tahun awal pendirian organisasi. Tahun 2017 nilai akuntabilitas hanya pada kategori cukup dengan nilai 51, Tahun 2018 naik menjadi kategori B

dengan nilai 60,9, Tahun 2019 masih pada kategori B dengan nilai 64,71, Tahun 2020 mendapat kenaikan nilai yang cukup baik yaitu 68,85 dan Tahun 2021 mendapatkan nilai 69,94 Tahun 2022 mendapatkan nilai 70,72 dengan kategori sangat baik dan Tahun 2023 mendapatkan nilai 70,87 dengan kategori sangat baik, diharapkan nilai kinerja ini akan menjadi lebih baik pada tahun berikutnya. Untuk lebih jelasnya perkembangan Nilai Akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dari sejak awal didirikan sampai dengan saat ini atau Tahun 2017-2023 dapat dilihat pada gambar berikut. diharapkan nilai kinerja ini akan menjadi lebih baik pada tahun berikutnya. Untuk lebih jelasnya perkembangan Nilai Akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dari sejak awal didirikan sampai dengan saat ini atau Tahun 2017-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar
Perbandingan Nilai Akuntabilitas Tahun 2017-2023



f. Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya berdasarkan aturan melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang pertanahan yang hasil pelaksanaan urusan tersebut terkait pelayanan tidak langsung bertemu dengan masyarakat namun dampaknya dari kegiatannya akan langsung berkaitan dengan aktivitas masyarakat. Pelayanan publik yang tidak secara langsung tersebut tetap harus diukur kualitasnya agar dapat melihat apakah kinerja urusan yang telah dilaksanakan memberikan dampak yang baik atau buruk. Tingkat kepuasan ini untuk menilai tingkat kepuasan ASN/Non ASN yang diberikan pelayanan oleh Organisasi. Pelayanan yang dimaksud disini merupakan pelayanan yang diberikan kepada ASN/Masyarakat yang menjadi *stakeholder* dari OPD yang bersangkutan.

Metode pengukurannya melalui survey dengan kuesioner yang dilakukan terhadap ASN dan masyarakat yang terkait dengan pelayanan publik dinas dalam bentuk form kuesiner/google form yang disebar melalui WhatAPP. Seluruh Data dan Informasi yang diperoleh diolah dan dilanjutkan dengan kegiatan identifikasi dan analisis. Hasil analisis tersebut selanjutnya dideskripsikan secara informatif dan komunikatif sebagai bahan evaluasi kinerja pelayanan dan kepuasan masyarakat yang diharapkan akan bermanfaat sebagai dasar perbaikan pelayanan di masa yang akan datang.

Tabel
Capaian Nilai Persepsi, Interval dan Mutu Kinerja

No	Unsur	Rata-Rata	Index	Kinerja Unsur
1	Informasi Layanan Yang Diberikan	3,456	86,4	Baik
2	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan dengan Jenis Pelayanan	3,416	85,4	Baik
3	Kompetensi/Kemampuan Personil Yang Melayani	3,4	85	Baik
4	Kedisiplinan Personil Dalam Melayani	3,328	83,2	Baik
5	Ketepatan Waktu Pelayanan Sesuai SOP	3,344	83,6	Baik
6	Kesopanan dan Keramahan Personil Dalam Memberikan Pelayanan	3,44	86	Baik
7	Tanggung Jawab Personil Dalam Memberikan Pelayanan	3,408	85,2	Baik
8	Keadilan Personil Dalam Memberikan Pelayanan	3,344	83,6	Baik
9	Dukungan Infrastruktur Penunjang Pelayanan Yang Ada	3,448	86,2	Baik
Jumlah Rata-Rata Tertimbang			3,40	
IKM			85,0	
Nilai Mutu Pelayanan			B	
Kinerja Pelayanan			Baik	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Koordinasi dan Sinergi Program Antara Perangkat Daerah Provinsi Dengan kab/ kota serta K/L di tingkat pusat

Koordinasi dengan kabupaten/kota dan kementerian/lembaga menjadi hal yang mutlak dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yaitu terkait dengan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan. Terkait urusan tersebut koordinasi dilakukan dengan :

- a. Urusan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemendagri dan Bappenas selaku kementerian terkait dan OPD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Koordinasi lain juga dilakukan dengan pihak swasta dan organisasi/lembaga/asosiasi profesi dan perbankan.
- b. Untuk Urusan pertanahan koordinasi dilakukan dengan Kementerian ATR/BPN, Kemendagri dan Bappenas selaku kementerian terkait dan OPD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan urusan pertanahan serta koordinasi dengan pihak swasta dan organisasi/lembaga/asosiasi profesi.
- c. Bentuk koordinasi dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi, sosialisasi, forum lintas perangkat daerah dan sinkronisasi kegiatan secara langsung dilapangan.

Berdasarkan telaahan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis Pembangunan Infrastruktur bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang penyelenggaraan menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut ;

Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

1. Back Log meningkat, dikarenakan Pertumbuhan penduduk , faktor lemahnya ekonomi masyarakat, akibat bencana alam,dll.

2. Ketersediaan Lahan (*Land Banking*), faktor ketersediaan tanah ini yang menyebabkan tersendatnya perkembangan pembangunan perumahan.
3. Permukiman Kumuh meningkat, dikarenakan faktor lemahnya ekonomi, dan kurangnya 'Sadar Hidup Bersih'.
4. Banjir di permukiman, dikarenakan sudah padatnya permukiman, daya tampung saluran yang ada sekarang sudah tidak memenuhi kapasitas yang ada, sehingga jika curah hujan tinggi mengakibatkan luapan air.
5. Sulitnya perizinan bagi pengembang, dikarenakan faktor ego sektoral.
6. Sulitnya persyaratan dari pihak Bank, dikarenakan pihak Bank memiliki peraturan yang telah ditetapkan, sehingga menyulitkan masyarakat yang tidak punya slip gaji untuk memiliki rumah.
7. Penataan bangunan dan lingkungan masih belum optimal, dikarenakan kurangnya kepedulian akan penataan lingkungan yang layak. Dalam perencanaan rancangan kawasan perlu dipertimbangkan penataan lingkungan yang layak.
8. Ketersediaan Data Rumah Tidak Layak Huni yang Valid.

Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah adalah Mewujudkan Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan dan misi yang terkait dengan tupoksi urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah pada Misi 6 yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan dengan tujuan terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata dengan sasaran Mewujudkan Infrastruktur Pelayanan Dasar Bangunan Strategis dan Pertanian. Penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berkaitan dengan misi kepala daerah dalam bentuk :

1. Peningkatan kualitas perumahan terhadap rumah tidak layak huni pada kawasan kumuh kewenangan provinsi sehingga masyarakat memiliki bangunan rumah yang lebih layak huni sesuai dengan standar bangunan dan memenuhi syarat kesehatan
2. Penyediaan infrastruktur dasar lingkungan pada permukiman berupa prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang memadai sehingga meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar permukiman dengan sistem jaringan prasarana dan sarana regional.

3. Pembangunan infrastruktur yang terencana akan mendorong penataan ruang yang lebih baik, sehingga kawasan permukiman menjadi lebih teratur dan terintegrasi dengan fasilitas umum lainnya.
4. Pembangunan infrastruktur yang baru dapat menjadi momentum untuk melakukan revitalisasi kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

Tantangan yang dihadapi adalah :

1. Keterbatasan Anggaran
Anggaran yang terbatas seringkali menjadi kendala utama dalam mewujudkan program-program perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan.
2. Pertambahan Penduduk dan Urbanisasi
Peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi yang cepat menyebabkan kebutuhan akan perumahan dan infrastruktur semakin meningkat, sementara ketersediaan lahan semakin terbatas.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia
Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perumahan dan permukiman dapat menghambat pelaksanaan program-program yang efektif.
4. Peraturan dan Kebijakan yang Kompleks
Regulasi yang tumpang tindih dan kompleks seringkali menyulitkan dalam pelaksanaan program-program di lapangan.
5. Permasalahan Pertanahan
Sengketa tanah, kepemilikan tanah yang tidak jelas, dan isu-isu terkait pertanahan lainnya seringkali menjadi hambatan dalam pengembangan kawasan permukiman.
6. Bencana Alam
Indonesia yang rawan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor, membutuhkan upaya khusus dalam pembangunan perumahan dan permukiman yang tahan bencana.
7. Perubahan Iklim
Perubahan iklim juga menjadi tantangan serius, terutama dalam hal pembangunan permukiman yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Peluang yang dimiliki adalah :

1. Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, seperti sistem informasi geografis (SIG) untuk perencanaan tata ruang, e-government untuk pelayanan perizinan, dan platform digital untuk partisipasi masyarakat.

2. Kemitraan dengan Sektor Swasta

Kemitraan dengan sektor swasta dapat mempercepat pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman, serta meningkatkan kualitas pelayanan.

3. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal

Pemanfaatan sumber daya lokal seperti bahan bangunan lokal dan tenaga kerja lokal dapat mengurangi biaya pembangunan dan meningkatkan keberlanjutan.

4. Pengembangan Perumahan Vertikal

Pengembangan perumahan vertikal dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan di perkotaan.

5. Pengembangan Kawasan Permukiman yang Berkelanjutan

Pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pembangunan kawasan permukiman dapat meningkatkan keberhasilan program dan keberlanjutannya.

Isu-Isu Strategis bidang Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Barat

1. Isu Strategis Pengembangan Permukiman

- a. Pengembangan permukiman baru
- b. Peningkatan kualitas permukiman
- c. Penanggulangan bencana alam pada kawasan permukiman
- d. Pembangunan Rusunawa pada kawasan padat penduduk
- e. Penyediaan prasarana dan sarana di perdesaan terutama mendukung kawasan agropolitan

- f. Percepatan pembangunan prasarana dan sarana pada perdesaan tertinggal.
2. Isu Strategis Pembangunan Prasarana, Saran Utilitas Umum Kawasan
 - a. Menurunnya kuantitas dan kuantitas air baku yang dipergunakan dalam sistem pelayanan air minum.
 - b. Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan di Provinsi Sumatera Barat.

Isu-Isu Strategis bidang Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat

Berkenaan dengan pengelolaan Bidang Pertanahan, terdapat isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Jaminan Kepastian Hukum Hak Masyarakat Atas Tanah

Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah masih menjadi isu utama, manakala faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi kepastian hukum hak atas tanah belum dapat diperbaiki secara signifikan. Faktor-faktor dimaksud, antara lain adalah rendahnya cakupan peta dasar pertanahan, rendahnya jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat, rendahnya kepastian batas kawasan hutan dan non hutan, rendahnya tingkat penyelesaian kasus pertanahan, dan rendahnya penetapan batas tanah adat/ulayat .

Saat ini, bila terjadi sengketa pertanahan antara dua pihak atau lebih dan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi dengan berperkara di pengadilan. Diperoleh fakta ada beberapa jenis pengadilan yang berbeda dengan kemungkinan keputusan pengadilan yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan kepastian hukum masyarakat terhadap hak atas tanah tidak dapat terjamin bahkan oleh lembaga peradilan yang ada.

2. Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) serta Kesejahteraan Masyarakat

Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) masih menjadi masalah. Meskipun secara menerus telah diupayakan redistribusi tanah dari berbagai sumber tanah, namun disadari bahwa sumber tanah untuk kegiatan redistribusi hanya tinggal berasal dari tanah terlantar dan pelepasan tanah hutan.

3. Kinerja Pelayanan Pertanahan

Upaya terus menerus yang dilakukan Pemerintah dalam memperbaiki kinerja pelayanan pertanahan, antara lain adalah dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen pertanahan nasional (Simtanas). Sepanjang tahun 2010- 2014 telah dikembangkan aplikasi sistem informasi pertanahan pada seluruh Kantor Wilayah Pertanahan. Namun demikian tetap dirasakan bahwa pelayanan pertanahan belum optimal.

Kemudian, teridentifikasi bahwa kurangnya kinerja pelayanan pertanahan karena masyarakat harus menunggu cukup lama untuk dapat menyelesaikan pelayanan pertanahannya sebagai akibat kurangnya jumlah Juru Ukur Pertanahan. Kondisi yang demikian menunjukkan adanya proporsi yang tidak seimbang antara juru ukur pertanahan dan non juru ukur sehingga memengaruhi kinerja pelayanan pertanahan menjadi tidak optimal.

4. Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum menjadi permasalahan bidang pertanahan terlihat dari pembebasan tanah yang berbelarut-larut dan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. UU No. 2/2012 tentang **Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum**, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta perangkat hukum turunannya, memberi kepastian dari sisi waktu pengadaan melalui pembatasan waktu maksimal pengadaan tanah. Namun demikian, peraturan tersebut belum dapat mengantisipasi permasalahan kepastian dari sisi perencanaan dan penganggaran pengadaan tanah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 merupakan acuan bagi penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan harus melakukan telaahan terhadap Rancangan RKPD agar sesuai dengan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan termasuk indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan rencana kerja sesuai dengan analisis kebutuhan dilakukan dengan tujuan untuk mensinkronkan program/kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan sama dengan RKPD sehingga program yang menjadi prioritas utama tahunan yang merupakan kebijakan pada RKPD Tahun 2026 dapat direalisasikan. Hasil perbandingan tidak ditemukan perbedaan program/kegiatan karena dalam proses penyusunan rencana kerja tahunan sudah mengakomodir kebijakan prioritas yang telah ditetapkan kepala daerah untuk Tahun 2026 yaitu :

- a. Sub kegiatan yang mendukung secara langsung ketercapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Sumatera Barat, target Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta target Program Unggulan Tahun 2026;
Kebijakan ini sudah diakomodir dengan program kegiatan yang merupakan IKD bagi Dinas Perkimtan.
- b. Sub kegiatan yang mengakomodir hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2026 terhadap usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan status diakomodir (hasil musrenbang);
Program usulan musrenbang sudah diakomodir melalui program Kawasan Permukiman dan Program Peningkatan PSU
- c. Sub kegiatan yang mengakomodir kategori belanja yang bersifat wajib yakni belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat salah satunya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
Terkait dengan SPM Bidang Perumahan sudah diakomodir melalui Program Pengembangan Perumahan.
- d. Sub Kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian program prioritas nasional antara lain Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Prevalensi Stunting. Untuk kebijakan ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak terlibat secara langsung tetapi mempunyai Program Kawasan Permukiman untuk penanganan kawasan kumuh dan



Program Peningkatan PSU Permukiman sebagai kegiatan dengan tujuan untuk menyediakan infrastruktur dasar lingkungan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan masyarakat di permukiman.



Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Provinsi Sumatera Barat

OPD : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Lembar Dari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100%	10.535.393.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100%	10.535.393.000	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Peran		169.988.900	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Peran		169.988.900	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Padang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	52.892.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Padang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	52.892.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.522.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.522.000	
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	107.574.900	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	107.574.900	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.239.300.725	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.239.300.725	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/Bulan	7.655.860.725	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/Bulan	7.655.860.725	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Padang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	583.440.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Padang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	583.440.000	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				117.927.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				117.927.000	
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Padang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	36.400.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Padang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	36.400.000,00	
1.3.2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Padang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	18 Laporan	81.527.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Padang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	18 Laporan	81.527.000	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				187.891.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				187.891.000	
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Padang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	87.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Padang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	87.000.000	
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Padang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	100.891.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Padang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	100.891.000	



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2026

OPD : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Lembar Dari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah				753.462.391	Administrasi Umum Perangkat Daerah				753.462.391	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.784.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.784.000	
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	115.021.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	115.021.700	
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	79.811.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	79.811.000	
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Padang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	13.104.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Padang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	13.104.000	
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	533.125.691	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	533.125.691	
1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Padang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.616.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Padang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.616.000	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				138.410.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				138.410.000	
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	6.380.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	6.380.000	
1.6.2	Pengadaan Mebel	Padang	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	25 Paket	95.255.000	Pengadaan Mebel	Padang	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	25 Paket	95.255.000	
1.6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	36.775.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	36.775.000	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				543.988.142	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				543.988.142	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	900.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	900.000	
1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporam	543.088.142	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporam	543.088.142	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang			384.424.842	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang			384.424.842	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	260.300.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	260.300.000,00	
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 unit	39.150.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 unit	39.150.000,00	
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	84.974.842	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	84.974.842	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana atau Akibat	3%	1.909.058.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana atau Akibat Relokasi Program Provinsi	3%	1.909.058.000	



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2026

OPD : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Lembar Dari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Relokasi Program Provinsi								
2.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana atau Akibat Relokasi Program Provinsi	20%	700.000.000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana atau Akibat Relokasi Program Provinsi	20%	700.000.000	
2.1.1	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Sumbar	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	150.000.000	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Sumbar	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	150.000.000	
2.1.2	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Sumbar	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	100.000.000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Sumbar	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	100.000.000	
2.1.3	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Sumbar	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	1 Dokumen	100.000.000	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Sumbar	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	1 Dokumen	100.000.000	
2.1.4	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Sumbar	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen	350.000.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Sumbar	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen	350.000.000	
2.2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				100.000.000	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				100.000.000	
2.2.1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Sumbar	Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	50 Orang	50.000.000	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Sumbar	Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	50 Orang	50.000.000	
2.2.2	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Sumbar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	50 Orang	50.000.000	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Sumbar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	50 Orang	50.000.000	
2.3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				850.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				850.000.000	
2.3.1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Rawan Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	450.000.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Rawan Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	450.000.000	
2.3.2	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	10 Unit Rumah	400.000.000	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	10 Unit Rumah	400.000.000	
2.4	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				259.058.000	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				259.058.000	
2.4.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1 Laporan	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1 Laporan	200.000.000	
2.4.2	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi		Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	10 Rumah Tangga	59.058.000	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi		Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	10 Rumah Tangga	59.058.000	
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				12.793.573.000	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				12.793.573.000	



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2026

OPD : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Lembar Dari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.1	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Sumbar			2.000.000.000	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Sumbar			2.000.000.000	
3.1.1	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Sumbar	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen	500.000.000	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Sumbar	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen	500.000.000	
3.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Sumbar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	2 Laporan	250.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Sumbar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	2 Laporan	250.000.000	
3.1.3	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh	Sumbar	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh	250 Orang	250.000.000	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh	Sumbar	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh	250 Orang	250.000.000	
3.1.4	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Pemukiman Kumuh	Sumbar	Jumlah Dokumen Data Pemukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	1.000.000.000	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Pemukiman Kumuh	Sumbar	Jumlah Dokumen Data Pemukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	1.000.000.000	
3.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				10.793.573.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				10.793.573.000	
3.2.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Sumbar	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	100 Unit Rumah	3.793.573.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Sumbar	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	100 Unit Rumah	3.793.573.000	
3.2.2	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Sumbar	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	6 Ha	7.000.000.000	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Sumbar	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	6 Ha	7.000.000.000	
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				1.823.672.000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				1.823.672.000	
4.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Sumbar			1.823.672.000	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Sumbar			1.823.672.000	
4.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Sumbar	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1	100.000.000	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Sumbar	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1	100.000.000	
4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Sumbar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	2 Laporan	73.672.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Sumbar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	2 Laporan	73.672.000	
4.1.3	Verifikasi dan Penyerahan PSU Pemukiman dari Pengembang	Sumbar	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Pemukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	100.000.000	Verifikasi dan Penyerahan PSU Pemukiman dari Pengembang	Sumbar	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Pemukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	100.000.000	
4.1.4	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Sumbar	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	8 Lokasi	1.550.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Sumbar	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	8 Lokasi	1.550.000.000	
5	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM				416.862.000	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK				416.862.000	



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2026

OPD : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Lembar Dari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.1	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi				416.862.000	KEPENTINGAN UMUM Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi				416.862.000	
5.1.1	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Sumbar	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	1 Dokumen	416.862.000	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Sumbar	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	1 Dokumen	416.862.000	
6	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				107.193.000	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				107.193.000	
6.1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				107.193.000	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				107.193.000	
6.1.1	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sumbar	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	67.193.000	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sumbar	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	67.193.000	
6.1.2	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sumbar	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Berita Acara	40.000.000	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sumbar	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Berita Acara	40.000.000	
7	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				107.193.000	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				107.193.000	
7.1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				107.193.000	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				107.193.000	
7.1.1	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Sumbar	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	1 Laporan	107.193.000	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Sumbar	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	1 Laporan	107.193.000	
8	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				47.641.000	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				47.641.000	
8.1	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				47.641.000	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				47.641.000	
8.1.1	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Sumbar	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	1 Berita Acara	47.641.000	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Sumbar	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	1 Berita Acara	47.641.000	
9	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT				59.552.000	PROGRAM PENETAPAN				59.552.000	



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2026

OPD : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Lembar Dari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
9.1	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				59.552.000	TANAH ULAYAT Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				59.552.000	
9.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sumbar	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	59.552.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sumbar	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	59.552.000	
10	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				59.552.000	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				59.552.000	
10.1	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong					Penyelesaian Masalah Tanah Kosong					
10.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	59.552.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	59.552.000	
11	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				59.552.000	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				59.552.000	
11.1	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				59.552.000	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				59.552.000	
11.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan	59.552.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan	59.552.000	
JUMLAH					27.919.241.000					27.919.241.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah yakni dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan usulan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aspirasi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat berupa usulan penyediaan PSU Permukiman yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Adapun beberapa Usulan Program dan kegiatan yang disampaikan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut.

Proses perolehan usulan program/kegiatan usulan dilakukan melalui beberapa pendekatan :

- a. Pendekatan teknokratis dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi lapangan berdasarkan basis data untuk dapat menetapkan lokasi penanganan kawasan kumuh provinsi dan permukiman
- b. Pendekatan politis terkait dengan aspirasi dari anggota legislatif provinsi yang banyak untuk mendukung Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- c. Pendekatan bottom up dan top down melalui mekanisme pelaksanaan musrenbang dan forum lintas OPD terkait dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman.
- d. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat melalui penyampaian usulan langsung dari masyarakat ke pada dinas. Berbagai usulan ditampung dan diproses untuk kemudian disesuaikan dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan). Dan dalam penyusunan RKPD tahun 2025, Disperkimtan telah menelaah dan memproses usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut.

Usulan-usulan dari perangkat daerah, aspirasi anggota dewan dan masyarakat untuk rencana kerja Tahun 2026 berkaitan dengan isu-isu penting yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yaitu peningkatan kualitas lingkungan permukiman



melalui penyediaan Prasarana Sarana Umum dan Utilitas untuk menunjang fungsi permukiman dan kawasan kumuh provinsi sehingga urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilaksanakan.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Provinsi Sumatera Barat

OPD : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Rancangan Awal RKPD				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman				
1.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Sumbar	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	100 paket	100 Pokir
1.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Sumbar	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	781 paket	781 Pokir
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
2.1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				
2.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Sumbar	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	12 Lokasi	12 Lokasi
2.1.2	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Sumbar	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	10,78 Ha	10,78 Ha



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2026

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, ditetapkan tujuh prioritas nasional, dengan beberapa fokus pembangunan yang meliputi industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial dan reformasi pendidikan dan keterampilan.

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemahaman ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang layak, dapat diwujudkan dengan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang sinergis dan melingkupi berbagai bidang, yaitu salah satunya adalah bidang perumahan agar mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Hingga saat ini, hampir seluruh daerah di Indonesia belum menempatkan pembangunan perumahan sebagai prioritas pembangunan di daerah masing-masing. Hal ini belum sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan



Pemerintah No. 38 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa urusan perumahan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan yang wajib (berkaitan dengan pelayanan dasar) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Target Outcome Infrastruktur dalam RPJM 2020 – 2024 terkait Bidang Perumahan dan Permukiman

INDIKATOR	Kondisi 2020	Target Akhir 2024
INFRASTRUKTUR DASAR		
Kawasan Kumuh Perkotaan	1,5%	27.000 Ha
Backlog Kebutuhan Rumah	814 ribu unit	6,46 Juta unit

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang tidak hanya yang dilaksanakan secara langsung oleh kementerian, akan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta. Arah kebijakan dan strategi utama pada masing-masing sektor serta arah kebijakan dan strategis lintas sektor. (Renstra Kemenpu-Pera Tahun 2020-2024).

Arah kebijakan yang berkaitan dengan Bidang Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Smart living yang tertuang dalam Visium Kementerian PUPR dimaknai sebagai permukiman cerdas. Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan smart living adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. Kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut, meliputi:

- a. Membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas, andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat return of investment, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman.
- b. Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur permukiman.
- c. Menerapkan inovasi terbaru dan/atau tepat guna dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

2. Arah Kebijakan dan Strategis Pembangunan Perumahan

Arah kebijakan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya; (2) Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya; (3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata; (4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas.
- b. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah, dengan strategi : (1) Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan land banking untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan millennials; (2) Kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan; (3) Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan; (4)

Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan; (5) Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan; (6) Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi; (7) Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan; (8) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR; (9) Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan.

- c. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dengan strategi: (1) Dukungan pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha; (2) Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang; (3) Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD; (4) Dukungan pengembangan sistem rumah umum (public housing) melalui perumusan regulasi, pembentukan kelembagaan, serta pengintegrasian dengan rumah sewa (rental housing), terutama pada 6 kawasan metropolitan prioritas; (5) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema lainnya) untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR; (6) Pengembangan klinik perumahan; (7) Dukungan Pengembangan system housing career; (8) Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Barat tema pembangunan Tahun 2026 merupakan akhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah peningkatan ekonomi pada tiga sektor yakni pertanian, UMKM dan pariwisata serta pemulihan akibat dampak dari pandemic Covid-19 sekaligus mendukung pencapaian tema RKP. Prioritas pembangunan Tahun 2026 untuk mewujudkan Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :



1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adai Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan 2 urusan yakni urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan wajib non pelayanan dasar pertanahan sehingga mendukung misi ke-6 melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar pada kawasan permukiman.

Tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan disusun dengan memperhatikan evaluasi kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi tahun 2023 sebagai berikut :

Evaluasi Kinerja Tujuan Dan Sasaran Tahun 2024

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan kawasan Permukiman	Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	18,90%	17,54%	93,33%
2		Meningkatnya PSU Permukiman	Persentase Peningkatan PSU Permukiman	51,77%	76,50%	147,94%
3		Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana.	100%	100%	100%
			2. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Tata Kelola	Meningkatnya Tata Kelola	Persentase masalah Pertanahan Yang	100%	100%	100%



NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Pertanahan	Pertanahan	Ditangani			
5	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,6)	BB (70,87)	100,38%
6		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85%	89%	105%

Adapun Tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 dan 2026

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET 2026
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan kawasan Permukiman	Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	28,35%	35,44%
2		Meningkatnya PSU Permukiman	Persentase Peningkatan PSU Permukiman	69,03%	86,28%
3		Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana. 2. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi	100% 100%	100% 100%
4	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase masalah Pertanahan Yang Ditangani	100%	100%
5	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB	BB
6		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85%	85%

3.3 Program dan Kegiatan



Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							Lembar Dari		
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				27.919.241.000				30.907.584.900
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi		100%	10.535.393.000				11.062.162.650
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Peran			169.988.900				178.488.345
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Padang	5 Dokumen	52.892.000	PAD		-	55.536.600
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang	4 Laporan	9.522.000	PAD		-	9.998.100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang	4 Laporan	107.574.900	PAD		-	112.953.645
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.239.300.725				8.188.230.111
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Padang	58 Orang/Bulan	7.655.860.725	PAD		-	7.509.524.111
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Padang	12 Dokumen	583.440.000	PAD		-	608.706.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				117.927.000				134.743.350
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Padang	1 Dokumen	36.400.000,00	PAD		-	49.140.000
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Padang	18 Laporam	81.527.000	PAD		-	85.603.350
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				187.891.000				151.610.550
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Padang	1 Paket	87.000.000	PAD		-	45.675.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Padang	58 Orang	100.891.000	PAD		-	105.935.550
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				753.462.391				810.767.361



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2026

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Padang	1 Paket	9.784.000	PAD	-	10.279.080
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Padang	1 Paket	115.021.700	PAD	-	120.775.830
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Padang	1 Paket	79.811.000	PAD	-	83.801.550
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Padang	5 Dokumen	13.104.000	PAD	-	14.264.250
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang	1 Laporan	533.125.691	PAD	-	576.396.651
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Padang	1 Dokumen	2.616.000	PAD	-	5.250.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				138.410.000			604.317.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Padang	1 Unit	6.380.000	PAD	-	525.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Padang	25 Paket	95.255.000	PAD	-	40.703.250
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Padang	2 Unit	36.775.000	PAD	-	38.613.750
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				543.988.142			571.187.549
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	1 Laporan	900.000	PAD	-	945.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Padang	4 Laporan	543.088.142	PAD	-	570.242.549
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Padang		384.424.842			492.818.384
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Padang	9 Unit	260.300.000,00	PAD	-	281.421.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Padang	55 unit	39.150.000,00	PAD	-	41.107.500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Padang	1 Unit	84.974.842	PAD	-	170.289.884
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana atau Akibat Relokasi Program Provinsi		3%	1.909.058.000			2.345.000.000
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana atau Akibat Relokasi Program Provinsi		20%	700.000.000			895.000.000
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Sumbar	1 Dokumen	150.000.000	PAD	-	170.000.000



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2026

	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Tingkat Kerusakan Rumah	Sumbar	1 Dokumen	100.000.000	PAD	-	170.000.000
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	Sumbar	1 Dokumen	100.000.000	PAD	-	170.000.000
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Sumbar	1 Dokumen	350.000.000	PAD	-	385.000.000
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				100.000.000		-	120.000.000
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Sumbar	50 Orang	50.000.000	PAD	-	60.000.000
	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Sumbar	50 Orang	50.000.000	PAD	-	60.000.000
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				850.000.000			1.050.000.000
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Rawan Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi		10 Unit Rumah	450.000.000	PAD		450.000.000
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun		10 Unit Rumah	400.000.000	PAD		600.000.000
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				259.058.000			280.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan		1 Laporan	200.000.000	PAD	-	220.000.000
	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah		10 Rumah Tangga	59.058.000	PAD		60.000.000
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				12.793.573.000			14.200.000.000
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Sumbar		2.000.000.000		-	2.700.000.000
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	Sumbar	1 Dokumen	500.000.000	PAD	-	600.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Sumbar	2 Laporan	250.000.000	PAD	-	300.000.000
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh	Sumbar	250 Orang	250.000.000	PAD		300.000.000
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Pemukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Pemukiman Kumuh yang Terverifikasi	Sumbar	1 Dokumen	1.000.000.000	PAD	-	1.500.000.000
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				10.793.573.000		-	11.500.000.000



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2026

	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Sumbar	100 Unit Rumah	3.793.573.000	PAD			4.000.000.000
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	Sumbar	6 Ha	7.000.000.000	PAD		-	7.500.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				1.823.672.000			-	2.400.000.000
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		Sumbar		1.823.672.000			-	2.400.000.000
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Sumbar	1	100.000.000	PAD		-	150.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Sumbar	2 Laporan	73.672.000	PAD			100.000.000
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Pemukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	Sumbar	1 Laporan	100.000.000	PAD			150.000.000
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Sumbar	8 Lokasi	1.550.000.000	PAD		-	2.000.000.000
	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM				416.862.000				437.705.100
	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi				416.862.000				437.705.100
	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	Sumbar	1 Dokumen	416.862.000	PAD		-	437.705.100
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				107.193.000			-	112.552.650
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				107.193.000				112.552.650
	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sumbar	1 Dokumen	67.193.000	PAD			70.552.650
	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sumbar	1 Berita Acara	40.000.000	PAD		-	42.000.000
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				107.193.000				112.552.650
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				107.193.000				112.552.650



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2026

	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	Sumbar	1 Laporan	107.193.000	PAD	-	112.552.650
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				47.641.000			50.023.050
	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				47.641.000	PAD		50.023.050
	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	Sumbar	1 Berita Acara	47.641.000	PAD	-	50.023.050
	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT				59.552.000			62.529.600
	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				59.552.000			62.529.600
	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sumbar	1 Laporan	59.552.000	PAD		62.529.600
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				59.552.000			62.529.600
	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong		1 Laporan	59.552.000	PAD		62.529.600
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				59.552.000			62.529.600
	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				59.552.000			62.529.600
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi		1 Laporan	59.552.000	PAD		62.529.600



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2026

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2026

Bagian ini berisikan program dan kegiatan serta pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana. Program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 disusun berdasarkan skala prioritas dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, program nasional dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu :

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- Pencapaian SDGs.
- Pengentasan kemiskinan.
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
- Pengembangan daerah terisoli



Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Tahun 2026

No	Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3
	1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
	1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1.1	1.04.01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1		01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.2		06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.1.3		07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2	1.04.01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1		01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2		02 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
1.3	1.04.01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.3.1		02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1.3.2		04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
1.4	1.04.01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.4.1		02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.4.2		09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.5	1.04.01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.5.1		01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.5.2		02 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.5.3		03 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.5.4		04 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.5.5		05 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.5.6		06 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.6	1.04.01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.6.1		02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.6.2		06 Pengadaan Mebel
1.6.3		09 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.7	1.04.01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.7.1		01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.7.2		04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.8	1.04.01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.8.1		02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.8.2		06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.8.3		10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
2.1	1.04.02 1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
2.1.1		02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
2.1.2		09 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi
2.1.3		10 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
2.1.4		11 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi



No	Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3
2.2	1.04.02 1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
2.2.1	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
2.2.2	10	Sosialisasi tentang mekanisme penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
2.3	1.04.02 1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
2.3.1	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
2.3.2	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
2.4	1.04.02 1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
2.4.1	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan
2.4.2	06	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
3	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
3.1	1.04.03 1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
3.1.1	08	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP
3.1.2	17	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
3.1.3	18	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh
3.1.4	20	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
3.2	1.04.03 1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
3.2.1	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha
3.2.2	13	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha
4	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
4.1	1.04.05 1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
4.1.1	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
4.1.2	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
4.1.3	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang
4.1.4	09	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman
	2	URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
5	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
5.1	2.10.03 1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
5.1.1	03	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
6	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
6.1	2.10.04 1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
6.1.1	05	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
6.1.2	06	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
7	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN



No	Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3
7.1	2.10.05 1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
7.1.1	04	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
8	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
8.1	2.10.06 1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
8.1.1	05	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
9	2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
9.1	2.10.07 1.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
9.1.1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
10	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
10.1	2.10.08 1.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
10.1.1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
11	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
11.1	1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
11.1.1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

4.2 Pendanaan

Sumber pendanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 adalah APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 dan APBN Tahun Anggaran 2026.





BAB IV

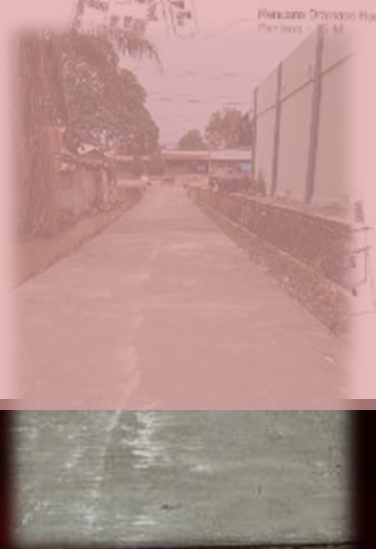
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Setelah Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2026 dibuat, maka perlu dipersiapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2026 yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026



DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta target Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.

Renja Tahun 2026 merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026 dan menjadi bahan materi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

Demikianlah Rencana Kerja ini disusun semoga dapat membantu pelaksanaan kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

Padang, Januari 2025

Kepala Dinas

dto

RIFDA SURIANI, ST, Sp
NIP 19680516 199503 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 3

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

 1.4 Sistematika Penulisan..... 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD 2020 8

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD 8

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 27

 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..... 72

 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 75

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat..... 75

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 76

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 76

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD..... 79

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 89

 4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2025..... 89

 4.2 Pendanaan..... 92

BAB V PENUTUP 93